

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Teori

2.1.1 Kebijakan Publik

Istilah kebijakan publik sendiri adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris “*Public Policy*”. *Public Policy* selain diterjemahkan menjadi kebijakan publik ada juga yang menterjemahkan sebagai kebijakan negara atau kebijakan pemerintah (Islamy,1988:2). Carl I. Friedrik (dalam Dwijowijoto : 2003 : 4) mendefinisikan kebijakan sebagai “serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dengan ancaman dan peluang yang ada, dimana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan yang ada dalam rangka pencapaian tujuan tertentu”.

Menurut Thomas R. Dye (dalam Pasolong, 2008:39) mengatakan bahwa kebijakan publik adalah “apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan”. Dye mengatakan bahwa bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya dan kebijakan publik itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja.

Adapun definisi kebijakan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Wahab, 1997:2) adalah “kebijakan diartikan sebagai pedoman bertindak, pedoman bisa jadi sangat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, public atau privat, atau dengan kata lain kebijakan berupa deklaratif, mengenai suatu dasar pandangan bertindak suatu arah tindakan tertentu atau program mengenai aktivitas tertentu suatu rencana”

Menurut Thomas R. Dye, James E. Anderson dan David Easton (dalam Subarsono 2005:8) pengertian kebijakan publik adalah sebagai berikut:

“Kebijakan Publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan pemerintah, kebijakan public baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan Publik ditujukan untuk kepentingan masyarakat”.

Sedangkan Menurut Frederick (dalam Nawawi 2009:8) kebijakan publik adalah suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangkai mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Mengacu pada pendapat diatas dapat dikatakan bahwa kebijakan adalah prosedur memformulasikan sesuatu berdasarkan aturan tertentu yang kemudian digunakan sebagai alat untuk memecahkan permasalahan dan mencapai suatu tujuan. Dalam setiap kebijakan pasti membutuhkan orang-orang sebagai perencana dan pelaksana kebijakan maupun objek dari kebijakan itu sendiri.

Islamy (2000: 117-119), berpendapat bahwa tidak tercapainya suatu tujuan kebijakan karena:

- a. Tersedianya sumber-sumber yang terbatas baik tenaga, biaya, material, waktu dan sebagainya
- b. Kesalahan dalam mengadministrasikan kebijakan
- c. Dalam merumuskannya hanya berdasarkan satu faktor
- d. Masyarakat merespon/melaksanakan kebijakan sesuai dengan caranya mereka masing-masing
- e. Terjadi kebijakan yang mempunyai tujuan yang bertentangan antara yang satu dengan yang lain
- f. Usaha untuk memecahkan masalah dengan biaya yang lebih besar dari masalahnya sendiri
- g. Terjadinya perubahan sifat kebijakan ketika suatu kebijakan dirumuskan
- h. Adanya masalah baru yang menarik dan dapat mengalihkan perhatian orang dari masalah yang ada

2.1.2 Implementasi Kebijakan

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi, 2009:131) implementasi kebijakan adalah tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan untuk tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Sedangkan menurut Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Nawawi, 2009:131) Implementasi kebijakan adalah “pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan penelitian.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas yaitu merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut Eugene Bardach (dalam Agustino, 2006:153), menyatakan bahwa implementasi kebijakan adalah:

Cakupan untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum yang kelihatannya bagus di atas kertas. Lebih sulit lagi merumuskan dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi telinga para pemimpin dan para pemilih yang mendengarnya. Lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk yang merumuskan semua orang.

Hal tersebut di atas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan adalah penerapan atau pelaksanaan pengendalian arah yang telah ditetapkan sebelumnya yang dilakukan pemerintah dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran sebagaimana yang dirumuskan dalam kebijakan

Pada umumnya, implementasi kebijakan merupakan kegiatan membentuk suatu hubungan yang dimungkinkan mencapai tujuan program atau kebijakan, direalisasikan sebagai hasil aktivitas pemerintah. Jika sasaran dan tujuan umum serta dana untuk mencapai sasaran tersebut sudah tersedia, maka implementasi dapat dimulai. Suatu kebijakan yang diimplementasikan oleh implementor kebijakan tersebut diharapkan oleh pemerintah atau kelompok sasaran dapat berjalan dengan baik. Sehingga kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program, dapat dilihat dari pendapat Ripley & Franklin dalam Subarsono (2005:7) yang mengatakan bahwa:

“Keberhasilan implementasi memiliki arti bagi pihak yang berbeda-beda. Salah satu ukurannya adalah seberapa baik tujuan itu tercapai, baik mengenai prosedur maupun dampak. Ini merupakan suatu definisi keberhasilan yang valid. Ukuran keberhasilan implementasi yang lain dinyatakan dengan aktivitas-aktivitas yang secara umum menunjukkan arah produktif walaupun arah tersebut tidak ditentukan sebelumnya. Ukuran lain yang longgar, yang juga sering kali digunakan adalah waktu yang digunakan untuk menghasilkan kemajuan. Asumsi yang dipakai bahwa semakin pendek waktu yang dilewatkan/dibutuhkan kemajuan itu semakin tinggi tingkat keberhasilan. Sebagaimana diindikasikan diatas kelancaran fungsi operasi dan tidak adanya keluhan atau konflik tentang prosedur-prosedur dianggap sebagai keberhasilan implementasi.”

Berdasarkan dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa salah satu ukuran untuk menilai keberhasilan implementasi kebijakan adalah tercapainya tujuan yang diharapkan. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Ripley & Franklin (dalam Winarno 2002:14) bahwa ukuran keberhasilan implementasi kebijakan dapat dilihat dari:

1. keberhasilan suatu implementasi dapat diukur dengan tingkat kepatuhan birokrasi di tingkat bawah terhadap birokrasi di atasnya.
2. bahwa keberhasilan implementasi ditandai dengan lancarnya rutinitas fungsi dan tidak adanya masalah-masalah yang dihadapi.
3. bahwa keberhasilan implementasi mengacu dan mengarah pada implementasi dan dampaknya yang dikehendaki dari sasaran-sasaran program yang ada.

Ukuran ini telah menjadi ukuran yang sangat umum dan dipakai oleh setiap pemerintahan yang melaksanakan suatu kebijakan. Ukuran-ukuran yang lain dapat disebutkan adalah waktu dalam pencapaian tujuan.

Implementasi kebijakan biasanya dipengaruhi oleh beberapa variabel atau faktor-faktor yang menentukan agar tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Van Meter dan Van Horn (dalam Nawawi:2009:139), menyatakan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi implementasi, yaitu:

1. Standar dan sasaran kebijakan. Setiap kebijakan publik harus mempunyai standar dan suatu sasaran kebijakan jelas dan terukur. Dengan ketentuan tersebut tujuannya dapat terwujud. Dalam standar dan sasaran kebijakan tidak jelas, sehingga tidak bisa terjadi multi-interpretasi dan mudah menimbulkan kesalah-pahaman dan konflik di antara para agen implementasi.
2. Sumberdaya Implementasi. Dalam suatu implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (*human resources*), maupun sumber daya material (*matrial resources*), dan sumberdaya metoda (*method resources*). Dari ketiga sumberdaya tersebut yang paling penting adalah sumberdaya manusia, karena disamping sebagai subjek implementasi kebijakan juga termasuk objek kebijakan publik.
3. Komunikasi antar Organisasi. Dalam banyak program implementasi kebijakan, sebagai realitas dari program kebijakan perlu hubungan yang baik antar instansi yang terkait, yaitu dukungan komunikasi dan koordinasi. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerja sama antar instansi bagi keberhasilan suatu program tersebut. Komunikasi dan koordinasi merupakan salah satu urat nadi dari sebuah organisasi agar program-program tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya.
4. Karakteristik agen pelaksana. Dalam suatu implementasi kebijakan agar mencapai keberhasilan maksimal harus diidentifikasi dan diketahui karakteristik agen pelaksana yang mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, semua itu akan mempengaruhi implementasi suatu program kebijakan yang telah ditentukan.
5. Disposisi implementor. Dalam implementasi kebijakan sikap atau disposisi implementor dibedakan menjadi tiga hal, yaitu : (a) respon

implementor terhadap kebijakan, yang terkait dengan kemauan implementor untuk melaksanakan kebijakan publik; (b) kondisi, yakni pemahaman terhadap kebijakan yang telah ditetapkan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki tersebut.

6. Kondisi lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

Model Implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edward III yang menamakan model implementasi kebijakan publiknya dengan Direct and Indirect Impact On Implementation dalam Leo Agustino (2006 : 149) dimana terdapat empat variabel yang sangat menentukan keberhasilan implementasi suatu kebijakan yaitu : (1) Komunikasi, (2) Sumberdaya, (3) Disposisi, (4) Struktur Birokrasi.

Variabel pertama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan, menurut George C. Edward III, adalah komunikasi. Komunikasi, menurutnya lebih lanjut, sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan mereka kerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan mereka kerjakan dapat berjalan bila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan implementasi harus ditransmisikan (atau dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Selain itu, kebijakan yang dikomunikasikan pun harus tepat, akurat, dan konsisten. Komunikasi (atau penransmisian informasi) diperlukan agar para pembuat keputusan di dan para implementor akan semakin konsisten dalam melaksanakan setiap kebijakan yang akan diterapkan dalam masyarakat. Terdapat tiga indikator yang dapat dipakai (atau digunakan) dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut di atas, yaitu:

- a. Transmisi; penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (miskomunikasi), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga apa yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.
- b. Kejelasan; komunikasi yang diterima oleh para pelaksana kebijakan (street-level-bureuacrats) haruslah jelas dan tidak membingungkan (tidak ambigu/mendua). Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang

hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. c. Konsistensi; perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas (untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan.

Variabel atau faktor kedua yang mempengaruhi keberhasilan implementasi suatu kebijakan adalah sumberdaya. Sumberdaya merupakan hal penting lainnya, menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2006 : 151) dalam mengimplementasikan kebijakan. Indikator sumber-sumberdaya terdiri dari beberapa elemen, yaitu:

- a. Staf; sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Penambahan jumlah staf dan implementor saja tidak mencukupi, tetapi diperlukan pula kecukupan staf dengan keahlian dan kemampuan yang diperlukan (kompeten dan kapabel) dalam mengimplementasikan kebijakan atau melaksanakan tugas yang diinginkan oleh kebijakan itu sendiri.
- b. Informasi; dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Implementor harus mengetahui apakah orang lain yang terlibat di dalam pelaksanaan kebijakan tersebut patuh terhadap hukum.
- c. Wewenang; pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Ketika wewenang itu nihil, maka kekuatan para implementor dimata publik tidak terlegitimasi, sehingga dapat menggagalkan proses implementasi kebijakan. Tetapi, dalam konteks yang lain, ketika wewenang formal tersebut ada, maka sering terjadi kesalahan dalam melihat efektivitas kewenangan. Di satu pihak, efektivitas kewenangan diperlukan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan; tetapi di sisi lain, efektivitas akan menyusut manakala wewenang diselewengkan oleh para pelaksana demi kepentingannya sendiri atau demi kepentingan kelompoknya.
- d. Fasilitas; fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Variabel ketiga yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik, bagi George C. Edwards III, adalah

disposisi. Disposisi atau sikap dari pelaksana kebijakan adalah faktor penting ketiga dalam pendekatan mengenai pelaksanaan suatu kebijakan publik. Jika pelaksanaan suatu kebijakan ingin efektif, maka para pelaksana kebijakan tidak hanya harus mengetahui apa yang akan dilakukan tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, sehingga dalam praktiknya tidak terjadi bias.

Hal-hal penting yang perlu dicermati pada variabel disposisi, menurut George C. Edward III dalam Leo Agustino (2006 : 152), adalah:

a. Pengangkatan birokrat; disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga.

b. Insentif; Edward menyatakan bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor pendukung yang membuat para pelaksana kebijakan melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.

Variabel keempat, menurut Edward III, yang mempengaruhi tingkat keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia, atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang seharusnya dilakukan, dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebarkan sumberdaya-sumberdaya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik. Dua karakteristik, menurut Edward III, yang dapat mendongkrak kinerja struktur birokrasi/organisasi ke arah yang lebih baik, adalah: melakukan Standar Operating Procedures (SOPs) dan melaksanakan Fragmentasi. SOPs adalah suatu kegiatan rutin yang memungkinkan para pegawai (atau pelaksana kebijakan/administratur/birokrat) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatannya pada tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan (atau standar minimum yang dibutuhkan warga). Sedangkan pelaksanaan fragmentasi adalah upaya penyebaran tanggungjawab kegiatan-kegiatan atau aktivitas-aktivitas pegawai diantara beberapa unit kerja.

Grindle (dalam Nawawi, Ismail, 2009: 143-144), mengungkapkan keberhasilan Implementasi kebijakan public adalah sebagai berikut:

1. Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi
Berkaitan dengan berbagai kepentingan yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan. Indicator ini beragumen bahwasuatu kebijakan dalam pelaksanaannya pasti banyak melibatkan banyak kepentingan, dan sejauh mana kepentingan-kepentingan tersebut membawa pengaruh terhadap implementasinya.
2. Tipe manfaat
Pada poin ini content of policy berupaya untuk menunjukkan atau menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan harus terdapat beberapa jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang diwujudkan dalam pengimplementasian kebijakan yang hendak dilaksanakan.
3. Derajat perubahan yang ingin dicapai
Setiap kebijakan mempunyai target yang hendak dan ingin dicapai. Content of policy yang ingin dijelaskan pada poin ini adalah bahwa seberapa besar perubahan yang hendak atau yang ingin dicapai melalui suatu implementasi kebijakan harus mempunyai skala yang jelas.
4. Letak pengambilan keputusan
Pengambilan keputusan dalam suatu kebijakan memegang peranan penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan, maka pada bagian ini harus dijelaskan dimana letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan.
5. Pelaksana program
Dalam menjalankan suatu kebijakan atau program harus didukung adanya pelaksana kebijakan yang kompeten dan kapabel demi keberhasilan suatu kebijakan. Dan ini harus sudah terdata atau terpapar dengan baik pada bagian ini.
6. Sumber-sumber daya yang digunakan
Pelaksanaan suatu kebijakan juga harus didukung oleh sumber daya-sumber daya yang mendukung agar pelaksanaannya berjalan dengan baik.

Menurut Charles O' Jones dalam Nawawi (2009: 132-133) implementasi merupakan suatu kegiatan yang dimaksudkan untuk mengoperasionalkan sebuah program dengan melalui tiga pilar sebagai berikut:

- 1. Organisasi:** Pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metoda untuk menjadikan program berjalan.
- 2. Interpretasi:** Menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan.
- 3. Penerapan:** Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program.

Dapat juga dikatakan bahwa efektivitas suatu implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh perilaku birokrasi pelaksananya, dan perilaku tersebut akan dipengaruhi pula oleh lingkungan kebijakan. Aktor kebijakan berperan sangat penting didalam menentukan implementasi kebijakan. Mereka tidak terlepas dari nilai-nilai yang muncul diluar dirinya.

2.1.3 Retribusi

Pada era Desentralisasi saat ini, daerah diberikan keleluasaan menggali keuangan daerah dari pajak dan retribusi, karena pajak dan retribusi dapat sedikit meringankan biaya pembangunan pada suatu daerah.

Menurut Marbun (2003:137) Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas suatu pemahaman dengan prestasinya secara langsung. Sedangkan menurut Soemitro (2002:153), Retribusi adalah pembayaran-

pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara.

Sedangkan menurut Munawir (dalam Yosef Riwu Kaho, 1988:151) Retribusi merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan memberikan jasa secara langsung yang dapat ditunjuk. Dipaksakan maksudnya bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik pemerintah, dia tidak dikenakan. Retribusi sebagai “Pembayaran-pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa negara”.

Dari pengertian diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa retribusi merupakan pungutan yang dibuat oleh pemerintah karena seseorang atau badan hukum menggunakan jasa-jasa pemerintah.

Selanjutnya, penulis akan mengutip beberapa pengertian retribusi daerah. Menurut pendapat Gie (dalam Josef Riwu Kaho. 1988:152) retribusi daerah adalah pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik daerah atau kepentingan umum. Atau karena jasa yang diberikan langsung maupun tidak langsung

Menurut Kaho (1988:152), dari definisi tentang retribusi daerah maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Retribusi dipungut oleh daerah
2. Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung dapat ditunjuk

3. Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan oleh daerah.

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas mengenai retribusi secara umum maupun daerah, nyata bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah, khususnya pemerintah kota Pontianak, yang berbagai jenisnya ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Diantara berbagai jenis retribusi daerah yang memberikan sumbangan kepada pendapatan daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah bagi Pemerintah Daerah Kota Pontianak adalah Retribusi Pelayanan Pasar.

Dibuatnya Peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 kota pontianak tentang retribusi pelayanan pasar bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat perdagangan umum yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pada prinsipnya, pemerintah daerah Kota Pontianak melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan Komunikasi dan UKM memberikan pelayanan fasilitas tempat bagi pedagang di Pasar Kemuning, dan bagi pengguna fasilitas itu wajib membayar retribusi pelayanan pasar tersebut.

Berdasarkan peraturan daerah nomor 4 tahun 2005 kota pontianak, Obyek retribusi Pelayanan Pasar adalah setiap penggunaan Pasar dan

Tempat Perdagangan Umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah seperti :

- a. Pasar tradisional termasuk didalamnya kios dan los ;
- b. Pertokoan ;
- c. Toko didalam maupun diluar kawasan pasar ;
- d. Pedagang kaki lima termasuk didalamnya gerobak, tenda, bakulan, hampan baik didalam maupun diluar kawasan pasar. yang diizinkan oleh Pemerintah Daerah.

Sedangkan subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang berdagang/berusaha pada tempat/bangunan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Untuk mengukur tingkat penggunaan jasa dan menetapkan besaran tarif yang ditetapkan, pemerintah mengukurnya berdasarkan jenis dan luas tempat yang digunakan sebagai fasilitas pasar.

Penarikan retribusi pasar terhadap bangunan los, tendanisasi diatas tanah milik pemerintah dan pedagang kaki lima (bakulan/hampan, meja dan gerobak didalam maupun diluar kawasan pasar tradisional dilakukan setiap hari dan dilaksanakan oleh petugas penarik uang retribusi.

2.2 Penelitian Yang Relevan

Lisdawati. 2012. Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pontianak Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Dinas Perindustrian,

Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak (Studi Kasus Pasar Flamboyan Kota Pontianak). Pontianak: Program Magister Ilmu Sosial Universitas TanjungPura.

Penelitian yang dilakukan oleh Lisdawati adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kota Pontianak. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah komunikasi yang tidak berjalan dengan baik dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar. Hal ini dapat dilihat dari adanya keberatan terhadap penetapan retribusi pasar, penghindaran pembayaran oleh wajib retribusi pasar, masih ada obyek yang belum tergali. Sedangkan sumber daya manusia dalam implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar dapat dikatakan sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari pungutan pegawai yang berpola "*the right man on the right job*"

Susito, Endri. 2008. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Pasar Kenanga Kelurahan Dalam Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Pontianak: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.

Penelitian yang dilakukan oleh Endri adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi pelayanan pasar di pasar Kenanga. Faktor-faktor tersebut antara lain komunikasi yang kurang optimal antara pelaksana kebijakan dengan sasaran kebijakan.

Kurang optimalnya, terutama dalam konteks sosialisasi kebijakan, pemerataan dalam distribusi informasi dan kejelasan informasi tentang besarnya pungutan dan kategori pungutan , serta pembinaan kepada para pedagang.

Kemudian, Sumber Daya Organisasi yang mendukung Implementasi Kebijakan tersebut dinilai masih kurang, baik dari segi Sumber Daya Manusia, fasilitas kerja yang diberikan kepada petugas pelaksana.

UNIVERSITAS TANJUNGPURA

2.3 Kerangka Pikir

